


Manajemen Pengelolaan Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat

Akhwan Mashudi¹, Ahyar², Subki³

^{1,2,3} Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram

<p>Info Artikel</p> <hr/> <p>Sejarah Artikel: Diterima: Juni, 2024 Disetujui: Agustus, 2024 Dipublikasi: September, 2024</p> <hr/> <p>Kata kunci: <i>Manajemen Keuangan, Dana BOS, Partisipasi Masyarakat</i></p> <hr/> <p>Keywords: <i>Financial Management, BOS, Partisipation Public</i></p>	<p style="text-align: center;">ABSTRAK</p> <p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dalam tiga tahap yaitu <i>data condensation</i>, <i>data display</i> dan <i>conclusion drawing</i>. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dengan cara: melakukan perencanaan seperti menyusun RAPBS dan RKAS, pelaksanaan dalam manajemen keuangan, pengawasan dan evaluasi, dan pertanggung jawaban atau pelaporan. partisipasi masyarakat dalam manajemen sekolah meliputi beberapa bentuk partisipasi diantaranya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide, pikiran, pendapat dan gagasan, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, memberikan motivasi partisipasi dalam finansial/materi. termasuk beberapa faktor pendorong lainnya seperti jalinan komunikasi yang baik, keterlibatan masyarakat dalam program dan rapat tahunan sekolah. sedangkan implikasi manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini adalah meningkatnya transparansi keuangan sekolah seperti transparansi dalam perencanaan dana bantuan operasional sekolah, transparansi dalam pencatatan dana bantuan operasional sekolah dan transparansi dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Kemudian meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat, peningkatan kualitas pelaksanaan pembelajaran seperti sumber belajar yang memadai dan pemanfaatan perpustakaan yang terintegrasi dalam pelaksanaan pembelajaran, dan Peningkatan mutu kelulusan yang dicapai.</p> <p style="text-align: center;">ABSTRACT</p> <p>The aim of this research is to analyze the financial management of School Operational Assistance (BOS) funds in increasing community participation at Al-Mujahidin Tempos Islamic Middle School. The research method used is a qualitative research with data collection techniques using interviews, observation and documentation. Data analysis was carried out in three stages, namely <i>data condensation</i>, <i>data display</i> and <i>conclusion drawing</i>. The results of this research show that financial management of school operational assistance funds in increasing community participation is carried out by: planning such as preparing RAPBS and RKAS, implementation in financial management, monitoring and evaluation, and accountability or reporting. Community participation in school management includes several forms of participation including community participation in providing ideas, thoughts, opinions and ideas, community participation in decision making, providing motivation for financial/material participation . including several other driving factors such as good communication, community involvement in programs and annual school meetings. Meanwhile, the implications for financial management of school operational assistance funds are increased transparency of school finances, such as transparency in planning school operational assistance funds, transparency in recording school operational assistance funds and transparency in the use of school operational assistance funds. Then increasing community participation and trust,</p>
<p>Corresponding Author: Akhwan Mashudi Email: 210403020.mhs@uinmataram.ac.id</p>	

	<p>improving the quality of learning implementation such as adequate learning resources and integrated use of libraries in learning implementation, and increasing the quality of graduation achieved.</p> <p style="text-align: right;">© 2023 Akhwan Mashudi, Ahyar, Subki This is an open access article under the CC BY-SA 4.0 license</p> 
--	--

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara dalam rangka mengembangkan potensi diri dijamin oleh konstitusi. Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan berbangsa. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 (Depdiknas, 2003) dijelaskan tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, cerdas, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, maka manajemen keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai wali murid sangat penting dilakukan. Pentingnya manajemen keuangan lembaga pendidikan ini tentu tidak hanya menekankan pada segi *planning*, tetapi juga pada *organizing, actuating dan controlling* yang lebih baik (Jerome S. Arcaro, 2007).

Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, bahkan hak untuk mendapatkan pendidikan bagi setiap warga negara dalam rangka mengembangkan potensi diri dijamin oleh konstitusi. Pemerintah mengusahakan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional yang dapat mewujudkan kecerdasan kehidupan berbangsa (M. Hasbullah, 2015). Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Nomor 20 tahun 2003 dijelaskan tujuan pendidikan nasional adalah bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia Indonesia yang seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, berbudi pekerti yang luhur, sehat jasmani dan rohani, cakap, kreatif, cerdas, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Sebagai implementasi dari undang-undang tersebut, maka manajemen keuangan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya orang tua siswa sebagai wali murid sangat penting dilakukan. Pentingnya manajemen keuangan lembaga pendidikan ini tentu tidak hanya menekankan pada segi *planning*, tetapi juga pada *organizing, actuating dan controlling* yang lebih baik.

Tujuan manajemen keuangan pendidikan (S. Thomas Foster, 2017) adalah untuk mewujudkan tertib administrasi keuangan di lembaga pendidikan dan bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan ketentuan yang sudah digariskan mulai dari perundang-undangan, peraturan, instruksi, keputusan, dan kebijakan lainnya. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah Sekolah/Madrasah dijelaskan bahwa manajemen pendidikan oleh satuan pendidikan dasar dan menengah harus membuat hal yaitu: a) Rencana Kerja Jangka Menengah yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu empat tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan. b) Rencana kerja tahunan yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKA-S/M). c) Adanya transparansi penyelenggara manajemen keuangan lembaga pendidikan dalam menerima sumber pembiayaan pendidikan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola dana lembaga pendidikan tersebut. d) Adanya standar kinerja pengelolaan keuangan di setiap lembaga pendidikan yang keuangan pendidikan dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan pembiayaan pendidikan dan wewenangnya, antara lain sebagai otorisator, ordinator dan bendaharawan. e) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pengelolaan keuangan lembaga pendidikan dengan prosedur yang mudah, biaya murah dan pelayanan yang cepat. f) Regulasi pengelolaan keuangan yang memberikan kepastian hukum, maupun tata kelola sebagai rambu-rambu dalam menjalankan berbagai kebijakan publik memberikan pelayanan pendidikan secara maksimal.

Peraturan di atas, menggambarkan pentingnya manajemen keuangan sekolah baik melalui perencanaan yang matang dengan melakukan rencana kerja jangka panjang, menengah, tahunan, transparansi, partisipasi dan regulasi dalam pengelolaan keuangan sekolah. Adapun dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan bab V pasal 39 dijelaskan bahwa komponen penggunaan Dana Bantuan Operasional sekolah meliputi: a) penerimaan Peserta Didik baru, b) pengembangan perpustakaan, c) pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, d) pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran, e) pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah, f) pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, g) pembiayaan langganan daya dan jasa, h) pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah, i) penyediaan alat multimedia pembelajaran, j) penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian, k) penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan; dan, i) pembayaran honor.

Implementasi penggunaan bantuan operasional sekolah masih ditemukan berbagai dugaan penyimpangan. Intimidasi dan korupsi yang terjadi terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah menjadi perhatian Menteri Pendidikan. Kepala sekolah juga sering mengalami kendala dalam proses administrasi pembelanjaan dana bantuan operasional sekolah. Di sisi lain, kasus korupsi yang terjadi dalam penggunaan dana bantuan operasional sekolah dapat dihindari jika optimalisasi penggunaan teknologi informasi maupun aplikasi platform digital dapat dilakukan. Melihat kondisi tersebut, maka bantuan operasional sekolah haruslah dikelola dengan baik, dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dan semua warga sekolah dalam upata mencapai tujuan pendidikan. Hubungan yang baik antara masyarakat dengan sekolah merupakan hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan bersama. Bila lembaga pendidikan memberikan layanan yang baik bagi masyarakat maka ia akan menuai hasilnya, artinya mendapatkan dukungan yang positif dari masyarakat sebagai pemasok sistem pendidikan .

Manajemen keuangan dana BOS dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos masih belum maksimal dilakukan. Manajemen keuangan sekolah seperti bantuan operasional sekolah masih belum optimal dalam melakukan penyusunan

anggaran, pelaksanaan atau penyaluran anggaran, pembukuan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan sekolah. Manajemen pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah selama ini dilaksanakan dengan mengikuti fungsi manajemen yaitu dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan kontrol atau evaluasi. Tetapi dalam aplikasinya masih jauh dari fungsi manajemen itu sendiri, seperti perencanaan yang belum matang terkait anggaran sekolah, pengorganisasian terutama alur kerja, tugas dan tanggung jawab, penggunaan anggaran atau pembukuan serta pengawasan dan evaluasi penggunaan bantuan operasional sekolah. Meskipun demikian, berbagai usahapun terus dilakukan secara berkesinambungan (secara terus menerus) guna mengoptimalkan penggunaan dan pengelolaan keuangan sekolah yang lebih baik dan transparan termasuk keterlibatan masyarakat dan semua warga sekolah dalam pengambilan keputusan sehingga tujuan dapat dicapai secara bersama.

Manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah juga dilakukan dengan menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sesuai kondisi dan kebutuhan sekolah, kemudian melakukan pencatatan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Namun demikian, dalam realitasnya berbagai kendalapun masih sering kami hadapi dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ini seperti transparansi, subsidi silang, ketidakseimbangan antara anggaran dan kebutuhan, minimnya keterlibatan masyarakat dan warga sekolah dalam pengelolaan keuangan sekolah, sistem penyaluran yang lambat, tidak berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah, keterbatasan kemampuan IT sekolah, minimnya kemampuan pengelolaan keuangan sekolah, minimnya program pelatihan dan keterampilan pengelolaan keuangan sekolah, termasuk masalah kepala sekolah, bendahara sekolah, dan terutama sekali unsur masyarakat anggota tim manajemen bantuan operasional sekolah yang kurang maksimal dalam pengelolaan bantuan operasional sekolah.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif (Sugiyono, 2017) karena penelitian ini berupaya untuk menggambarkan dan mendeskripsikan fenomena yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Menurut Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong bahwa penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Lexy J. Moleong, 2018). Dalam penelitian kualitatif data yang diperoleh bersifat alamiah, dimana peneliti sebagai instrumen kunci dengan analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menguatkan makna data yang sebenarnya dan pasti dari pada generalisasi. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos. Kehadiran peneliti dilokasi penelitian berperan sebagai instrumen kunci dan menjadi penentu dari semua proses penelitian di lapangan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer yang diperoleh langsung dari informan dan data skunder adalah data yang tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya (John W. Creswell, 2016). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun langkah-langkah analisis data dilakukan dengan cara *collection* data, *condensation* data, *display* data dan *conclusion drawing* (Lexy J. Moleong, 2018). Untuk mendapatkan keabsahan data dilakukan dengan menggunakan empat cara yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, kecukupan referensi. dan triangulasi.

HASIL

Manajemen pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengelola semua sumber daya yang ada mulai dari *planning, organizing, actuating dan controlling* secara efektif dan efisien. Begitu pula dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah tidak lepas dari fungsinya dalam melakukan pengelolaan yang meliputi beberapa indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Tanggal 24 Januari 2024, Kepala Sekolah SMP Islam Al-Mujahidin Tempos mengatakan;

“manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dilakukan dengan perencanaan yang matang, kemudian mengimplementasikannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta membuat pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan agar penggunaan dana tersebut dapat tepat sasaran sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat sebagai masyarakat semakin meningkat khususnya di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos”.

guru SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara, Tanggal 24 Januari 2024 juga mengatakan;

“manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dilakukan dengan beberapa tahap seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi dan tahap pelaporan, termasuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen itu sendiri”

Hasil observasi yang dilakukan pada Tanggal 24 Januari 2024 menunjukkan bahwa: *“manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dilakukan berdasarkan atas musyawarah mufakat baik dengan tim manajemen bantuan operasional sekolah, dewan guru, dan komite sekolah. Selain itu, juga tampak dalam perencanaanya dilakukan dengan membuat Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS/RAPBS) disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Kemudian tampak juga pelaksanaan dan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan sesuai SOP dan aturan yang ada, kemudian dilakukan juga monitoring dan evaluasi serta membuat laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawaban atas dana atau keuangan sekolah itu sendiri”*

Kaitannya dengan hal ini dijelaskan bahwa manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan.

Adapun lebih jelasnya manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan dengan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, komite sekolah, siswa, orang tua/wali siswa, tokoh agama dan tokoh masyarakat

serta mitra atau masyarakat dan pihak terkait di sekolah tersebut, dijabarkan di bawah ini sebagai berikut:

1. Perencanaan

Melakukan perencanaan (*planning*) merupakan langkah awal yang dilakukan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos. Menurut Kepala Sekolah SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara, Tanggal 25 Januari 2024 mengatakan bahwa:

“perencanaan ini merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh sekolah terutama dalam menyusun RAPBS dan RKAS. Dalam penyusunannya melibatkan beberapa komponen penting di dalamnya seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, pegawai, wali murid dan komite sekolah serta melibatkan beberapa masyarakat sekolah atau pihak yang berkepentingan dengan sekolah. Hal ini dilakukan agar manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dapat terlaksana tepat sasaran, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan”

Bendahara SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara, Tanggal 27 Januari 2024 juga mengatakan terkait perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional ini bahwa:

“perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah yang termuat dalam RKAS dikelompokkan menjadi 4 kelompok yaitu belanja gaji pegawai negeri dan tata usaha, honor terdiri dari honor GTT, PTT, pengelola BOS dan administrasinya, belanja barang dan jasa, dan program sekolah yang terdiri dari standar isi, standar penilaian, standar tenaga pendidik dan kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan buku teks dan referensi, penerimaan siswa baru, bantuan siswa miskin dan perawatan sarana lingkungan sekolah yang diaplikasikan dalam 13 komponen yaitu pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru, kegiatan pembelajaran dan ekstra kurikuler pesertadidik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan dan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan KKG/MGMP, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP, pembiayaan pengelolaan BOS, pembelian dan perawatan perangkat komputer, biaya lainnya jika seluruh komponen 1 sampai 12 telah terpenuhi”

Hasil observasi pada Tanggal 29 Januari 2024 juga menunjukkan bahwa:

“perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan oleh Tim pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yaitu kepala sekolah langsung sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, wali murid dan Komite sekolah. Proses perencanaan diawali dengan menyusun RKAS oleh tim manajemen bantuan operasional sekolah, dewan guru, dan komite sekolah serta

beberapa masyarakat sekolah atau pihak yang berkepentingan dengan sekolah, dan mereka menjalankan peran, tugas dan fungsi masing-masing seperti kepala sekolah bertanggungjawab atas penggunaan dan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Kemudian dewan guru bertanggung jawab dalam menentukan anggaran kebutuhan guru dan karyawan serta menentukan kegiatan atau program pembelajaran di sekolah, komite sekolah bertanggung jawab dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atau pengawasan terhadap kegiatan sekolah kaitannya dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah termasuk menghadiri rapat pada saat penyusunan RKAS dan memberikan masukan-masukan penggunaan dana bantuan operasional sekolah”

Hasil observasi pada tanggal 29 Januari 2024 juga menunjukkan bahwa:

“perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan pada setiap awal tahun ajaran baru dengan membentuk tim pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang melibatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, pengurus komite sekolah dan orang tua murid melalui rapat dan hasil kesepakatan tertulis dalam RKAS untuk merencanakan kerja tahunan sekolah dan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja sekolah selama satu tahun”

Dengan demikian, penggunaan dana bantuan operasional sekolah yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP (kartu indonesia pintar), pembiayaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, pembelian dan perawatan perangkat komputer.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos sangat penting dilakukan, dengan pengelolaan yang baik, efektif dan efisien dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya pendidikan anaknya di sekolah itu sendiri. Selain itu, Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah hendaknya dilakukan dan dimanfaatkan penggunaannya dengan benar dan tepat sasaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Menurut guru SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara, Tanggal 31 Januari 2024 mengatakan bahwa:

“pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikelola secara transparan artinya dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ini diketahui oleh masyarakat sekolah dan dilakukan secara akuntabel yaitu

dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah”

Guru SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara, Tanggal 31 Januari 2024 juga mengatakan bahwa:

“pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos diawali dengan melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah. Pelaksanaannya berpedoman pada petunjuk teknis (Juknis) yang diedarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat. Bahkan kami membaca dan mempelajari dan menggunakan petunjuk teknis yang diedarkan oleh dinas pendidikan Kabupaten Lombok Barat dan kami melakukan sosialisasi dan koordinasi pada pihak-pihak yang terlibat baik para guru, komite sekolah maupun masyarakat dan pemerintah”.

Dalam pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen dana bantuan operasional sekolah dengan dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut kemudian kami tuangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat tidak lepas dari SDM yang memadai, amanah, transparan, profesional dan bertanggung jawab, sebab dalam pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini cukup kompleks dan membutuhkan sistem keuangan sekolah yang berusaha menyediakan sumber daya yang cukup sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar, masyarakat juga aktif terlibat dalam membangun dan memajukan sekolah sehingga tujuan pendidikan dan pembelajaran dapat dicapai secara maksimal.

Hasil observasi pada tanggal 31 Januari 2024 menunjukkan bahwa:

“pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah ini dilakukan profesional dan berdasarkan kesepakatan bersama dengan kepala sekolah, tim manajemen dana bantuan operasional sekolah dan komite sekolah serta wali murid. Semua pihak terkait melakukan musyawarah atau rapat terkait penggunaan dana bantuan operasional sekolah, mereka memberikan masukan, saran, arahan dan pendapat dan ide-ide positif untuk kemajuan sekolah. Selain itu, hasil kesepakatan tersebut kemudian dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara dan menjadi bukti atas kesepakatan atas pelaksanaan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos”

Dana bantuan operasional sekolah memiliki manfaat yang sangat besar bagi sekolah, sebab keberadaan dan bantuan operasional sekolah ini tidak hanya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memajukan sekolah tetapi juga berdampak pada anggaran sekolah,

aktivitas guru, hasil belajar dan aktivitas belajar siswa serta pengeluaran sekolah. Pembiayaan sekolah merupakan proses yang kompleks dengan beberapa tujuan yaitu, sistem keuangan sekolah berusaha untuk menyediakan sumber daya yang cukup sehingga siswa memiliki kesempatan untuk belajar tetapi pada saat yang sama sumber daya harus digunakan seefektif dan seefisien mungkin, pembuat kebijakan tidak selalu tahu cara terbaik untuk meningkatkan sistem keuangan sekolah mereka meskipun pembiayaan merupakan bagian penting dari sistem pendidikan. Sebab sumber daya manusia sekolah yang baik, menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pelaksanaan dan penggunaan (pengelolaan) keuangan dana bantuan operasional sekolah terutama dalam meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya masyarakat yang ada sekitar SMP Islam Al-Mujahidin Tempos.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan fungsi manajemen dan sangat penting dilakukan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos. Sebab dengan pengawasan tersebut diharapkan manajemen keuangan sekolah dapat berjalan lancar, transparan, akuntabel dan penggunaannya yang baik dan tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu pengawasan juga menjadi bagian kontrol dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk lebih berhati-hati dan memanfaatkannya sesuai dengan peruntukan dan kegunaannya berdasarkan aturan yang berlaku.

Hasil Observasi yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 menunjukkan bahwa:

“dana bantuan operasional sekolah yang telah diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang telah dikirimkan lewat dapodik selanjutnya digunakan sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah (RKAS) kemudian disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Laporan dana tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan ditempel pada papan informasi BOS di sekolah. Terhadap kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut harus dilakukan pengawasan dan monitoring atau pemeriksaan”

Kegiatan pengawasan tersebut untuk mengetahui dan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan apakah sudah sesuai atau terjadi penyimpangan. Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024 menunjukkan bahwa:

“pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen dana bantuan operasional sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengawasan ini ditemukan pengelolaan dana Bantuan operasional sekolah sudah dilakukan dan digunakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan dalam pencairan dana bantuan operasional sekolah dan penggunaan dana bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan setahun sekali oleh TIM dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat”

Kepala Sekolah SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada Wawancara tanggal 05 Februari 2024 mengatakan bahwa:

“pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat terhadap laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang dikirim oleh sekolah. Tim Manajemen dana bantuan operasional sekolah dari Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Lombok Barat melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana bantuan operasional sekolah seperti pengawasan dan evaluasi setiap triwulan atau sekali dalam enam bulan”

Bendahara SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada wawancara 05 Februari 2024 juga mengatakana bahwa:

“pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan secara bersama-sama oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, tim pengelolaan dana bantuan operasional sekolah termasuk TIM Dinas Pendidikan Kabupaten Lombok Barat, Propinsi serta Inspektorat. Pengawasan dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Hasil pelaksanaan pengawasan dituliskan dalam laporan pertanggungjawaban setiap triwulanan dan disampaikan kepada SKPD Pendidikan Kabupaten”

Hal ini diperkuat oleh hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 05 Februari 2024, yang menunjukkan bahwa:

“pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang ditentukan oleh kemendikbud, yaitu permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Pengawasan sudah dilakukan dan berjalan sesuai harapan pihak pengawas yang dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Pengawasan terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan dan pembetulan terhadap penyimpangan”

Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan selalu berpedoman kepada pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

4. Pertanggung jawaban atau Pelaporan

Pertanggungjawaban atau pelaporan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam al-Mujahidin Tempos. Pertanggungjawaban pengelolaan dana

bantuan operasional sekolah dilakukan melalui proses pelaporan oleh Bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan secara bertahap setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola dana bantuan operasional sekolah ini yaitu buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 12 Februari 2024 menunjukkan bahwa:

“laporan pertanggungjawaban dan bantuan operasional sekolah dilakukan pada bulan terakhir masing-masing triwulan seperti triwulan pertama untuk tahun anggaran 2023 dilakukan pada akhir bulan Maret 2023 dan triwulan kedua dilakukan pada akhir Juli 2023, triwulan ketiga dibuat pada akhir September 2023 dan triwulan keempat dibuat akhir Desember 2023”

Hasil wawancara pada tanggal 12 Februari 2024 yang dilakuka dengan guru SMP Islam Al-Mujahidin Tempos juga mengatakan bahwa:

“pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat kami buat dan lakukan pada setiap akhir masing-masing triulan seperti untuk tahun anggaran 2023 laporannya kami buat dalam empat tahap diantaranya laporan triwulan 1 dibuat akhir Maret 2023 dan dilaporkan paling lambat 10 April 2023, triwulan II dibuat akhir Juni dan dilapor kanpaling lambat 10 Juli 2023, triwulan III dibuat pada akhir September dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Oktober 2023, triwulan IV laporannya dibuat pada akhir bulan Desember 2023 dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Januari 2024. Begitu pula tahun tahun sebelumnya dilakukan sesuai petunjuk teknis atau juknis dan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar peranggungjawaban atau pelaporan dana bantuan operasional sekolah ini tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku”

Guru sebagai pelaksana kegiatan juga harus melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada kepala sekolah melalui serah terima barang. Laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah harus sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah yang telah dibuat. Jadi tidak boleh untuk kepentingan di luar rencana kerja yang sudah diprogramkan. Kebijakan ini dimaksud oleh Dinas Pendidikan kabupaten Lombok Barat agar dalam penyusunan rekapitulasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah tidak mengalami masalah. Mengingat dalam pencairan laporan rekapitulasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang dijabarkan dalam format bantuan operasional sekolah K7a sebagai syarat untuk pencairan dana selanjutnya. Kalau pihak sekolah terlambat membuat laporan dalam bentuk format bantuan operasional sekolah K7a akan berakibat pencairan dana triwulan berikutnya akan menjadi terlambat.

Kepala Sekolah SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada wawancara 12 Februari 2024 mengatakan bahwa:

“pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat dilakukan dalam bentuk laporan mengikuti format K7a dan harus sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah yang telah dibuat. Termasuk menyiapkan buku pembantu kas, buku Bank, buku pajak, kuitansi pembelian barang, daftar penerimaan honor atau insentif

dan tranfort. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekoah ini agak sedikit rumit dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan, sehingga pada triwulan pertama sering mengalami kesalahan terutama dalam pembuatan laporan dengan format BOS-K7a”

Bendahara SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada wawancara 12 Februari 2024 juga mengatakan bahwa:

“pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah bertujuan untuk tertib adamistrasi dalam pelaksanaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Alporan ini merupakan salah satu komponen penting dalam pengelolaan dana diberikan oleh pemerintah untuk digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku yaitu membuat laporan pelaksanaan kegiatan pengelolaan dana setiap triwulan atau membuat laporan realisasi kegiatan dalam bentuk format K-7a dengan mengetahui dan ditanda tangan oleh kepala sekolah dan bendahara sekolah termasuk juga harus mengetahui dan ditanda tangani oleh ketua Tim atau manajer bantuan dana operasional tingkat Kabupaten dan Kepala UPT Kecamatan setempat. Kemudian laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan operasional tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dikoreksi, diperiksa dan dinilai apakh sudah sesuai prosedur dan sesuai dengan pedoman juknis atau aturan yang berlaku atau tidak. Jika sudah sesuai dan benar, maka laporan tersebut diterima dan jika masih salah dan keliru dalam penyusunan laporan, maka sekolah disuruh memperbaikinya”

Kaitannya dengan Pembukuan ini dijelaskan bahwa pembukuan keuangan sendiri adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan selama proses berlangsungnya sebuah usaha yang bertujuan untuk menyimpan catatan dari semua transaksi keuangan secara tepat dan sistematis. Pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam al-Mujahidin Tempos menurut bendahara SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dan menurut Kepala Sekolah pada wawancara 12 Februari 2024, dilakukan melalui dua tahapan pokok yaitu: a) membuat pembukuan: b) bukti pengeluaran: Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 23 Februari 2024 juga menunjukkan bahwa:

“bukti pengeluaran dilakukan dengan membuat bukti keluar kas mulai dari keterangan sekolah tanggal terjadinya transaksi, nama barang atau jasa, jumlah kas yang dikeluarkan. bukti pembelian barang dan jasa yang dilakukan secara tunai, bukti pembayaran utang kepada pihak mitra, informasi pembayaran gaji karyawan, bukti retur pembelian barang yang dilakukan secara tunai, informasi neraca saldo yang seimbang, bukti pembelian aset tetap yang dilakukan secara tunai, informasi pembayaran berbagai beban dan lainnya. Selain itu, dalam format bukti kas keluar juga disertai tanda tangan setiap bagian keuangan, seperti kepala sekolah, bendahara sekolah, tim pengelola dana bantuan operasional sekolah dan lainnya”

Jadi, dapat dipahami bahwa bukti pengeluaran (bukti kas keluar) merupakan bukti semua dokumen pencatatan yang menunjukkan pengeluaran sejumlah uang perusahaan. Contoh bukti kas keluar adalah pembelian perlengkapan perusahaan seperti mesin fotocopy,

printer, alat tulis kantor, dan keperluan lainnya. Langkah pertanggungjawaban atau pelaporan selanjutnya dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam al-Mujahidin Tempos adalah membuat c) pelaporan dana bantuan operasional sekolah. guru SMP Islam Al-Mujahidin Tempos pada wawancara tanggal 29 Februari 2024 mengatakan bahwa:

“pelaporan pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah ini harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: Pertama, Setiap kegiatan wajib dibuatkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan. Kedua, Seluruh arsip data keuangan, baik yang berupa laporan-laporan keuangan maupun dokumen pendukungnya, disimpan dan ditata dengan rapi dalam urutan nomor dan tanggal kejadiannya, serta disimpan disuatu tempat yang aman dan mudah untuk ditemukan setiap saat. Ketiga, Laporan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dari ditingkat sekolah kepada tim manajemen BOS tingkat Kabupaten cukup menggunakan format realisasi penggunaan dana persumber dana. Sedangkan format Buku Kas Umum, format Buku Kas Pembantu, dan format Buku Bank Pembantu beserta dokumen pendukungnya diarsipkan di sekolah”

Hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 29 Februari 2024 juga menunjukkan bahwa:

“sistem pelaporan dan prosedur atas manajemen atau pengelolaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah ini sudah sesuai dengan yang ditetapkan. Dimana jumlah dana bantuan operasional sekolah yang diterima dari pemerintah kemudian dimanfaatkan dan digunakan dengan baik, sesuai pedoman dan juknis serta aturan yang berlaku, untuk kegiatan operasional sekolah. Artinya besarnya dana bantuan operasional sekolah yang diterima sebanding atau sama dengan pengeluaran dana bantuan operasional sekolah tersebut. Dan jumlahnya sangat tergantung pada jumlah siswa yang ada di di SMP Islam al-Mujahidin Tempos itu sendiri. Dalam penggunaannya dan pengelolaannya dilakukan secara transparan, akuntabel dan berkeadilan, efektif dan efisien guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun dan memajukan sekolah khususnya di SMP Islam al-Mujahidin Tempos”.

laporan merupakan bentuk penyampaian informasi secara lisan maupun tulisan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Hal yang terpenting dalam laporan adalah fakta dan data yang dicantumkan adalah hal yang nyata tanpa dibuat-buat.

PEMBAHASAN

Manajemen pada dasarnya merupakan kemampuan seseorang dalam mengatur dan mengelola semua sumber daya yang ada mulai dari *planning, organizing, actuating dan controlling* secara efektif dan efisien (Soetopo & Wasty Soemanto, 2002). Begitu pula dalam Manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos tidak lepas dari fungsinya dalam melakukan pengelolaan yang meliputi beberapa indikator yaitu perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dan pelaporan. Proses implementasi manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat (Hiryanto, 2018) di SMP

Islam Al-Mujahidin Tempos diharapkan mampu dilakukan dengan sebaik mungkin, dengan memanfaatkan dana operasional sekolah secara efektif dan efisien serta melibatkan partisipasi masyarakat secara aktif sehingga dapat memberikan hasil atau out put yang berkualitas baik pada guru, staf, siswa maupun unsur dan lainnya.

Selain itu juga manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran, fleksibel, akuntabel, transparan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk penggunaan dana bantuan operasional sekolah di sekolah yang didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen bantuan operasional sekolah, dewan guru, dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan RKAS/RAPBS disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Pengalokasian dana bantuan operasional sekolah di sekolah disesuaikan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah dengan ketentuan bahwa dana bantuan operasional sekolah bisa digunakan pada kegiatan dan kebutuhan sekolah. Manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dilakukan dengan perencanaan yang matang, mengimplementasikannya sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta membuat pelaporan keuangan. Hal ini dilakukan agar penggunaan dana tersebut dapat tepat sasaran sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat sebagai masyarakat semakin meningkat khususnya di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos.

Manajemen keuangan (Syunu Trihantoyo, 2017) dana bantuan operasional sekolah dilakukan dengan beberapa tahap seperti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, tahap monitoring dan evaluasi dan tahap pelaporan, termasuk berpegang teguh pada prinsip-prinsip manajemen itu sendiri seperti: a) fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan SMP Islam Al-Mujahidin Tempos, b) efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan, c) efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal, e) akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, d) transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan.

Kaitannya dengan hal ini dijelaskan bahwa manajemen keuangan dalam lembaga pendidikan adalah suatu kegiatan yang dilakukan pimpinan dalam menggerakkan para bawahannya untuk menggunakan fungsi-fungsi manajemen, meliputi perencanaan keuangan (penganggaran), pengelolaan berupa pengeluaran (pencairan), penggunaan, pencatatan, pemeriksaan, pengendalian, penyimpanan dana, pertanggungjawaban dan pelaporan uang yang dimiliki oleh suatu institusi (organisasi), termasuk di dalamnya lembaga yang menyelenggarakan layanan pendidikan (Arwildayanto, et.al, 2017). Dalam (*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Pasal 1 Ayat (39)*, n.d.) mendefinisikan Anggaran Pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan dana desa, dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik, tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Manajemen keuangan dan pembiayaan pendidikan juga merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Departemen Pendidikan Nasional menyatakan bahwa manajemen keuangan adalah sebuah tindakan dalam kepengurusan atau ketatausahaan keuangan yang mencakup proses pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggung jawaban, dan pelaporan (Departemen Pendidikan Nasional, 2012).

Dengan demikian, manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah meliputi perencanaan dalam hal pembiayaan disebut rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), perencanaan telah disusun dijadikan pedoman dalam pelaksanaan dan evaluasi. Penyusunan alokasi anggaran memang menyesuaikan dengan keadaan sekolah dan mengacu pada petunjuk teknis yang ada. Untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan bantuan dana operasional sekolah, maka diperlukan laporan administrasi keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Rahmadhani & Suparno, 2020). Hal ini penting dilakukan agar manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah (BOS) sehingga kepercayaan dan partisipasi masyarakat semakin meningkat. Adapun terkait dengan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan dengan cara yaitu:

1. Perencanaan

Melakukan perencanaan (*planning*) merupakan langkah awal yang dilakukan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah. Perencanaan ini dilakukan oleh sekolah terutama dalam menyusun RAPBS dan RKAS. Dalam penyusunannya melibatkan beberapa komponen penting di dalamnya seperti kepala sekolah sebagai penanggung jawab, bendahara sekolah, dewan guru, pegawai, wali murid dan komite sekolah serta melibatkan beberapa masyarakat sekolah atau pihak yang berkepentingan dengan sekolah (wawancara, 25 Januari 2024). Hal ini dilakukan agar manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dapat terlaksana tepat sasaran, akuntabel dan transparan serta sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah penting dilakukan untuk mempermudah dan memperlancar serta memperjelas arah dan tujuan pengelolaan dana operasional sekolah oleh semua unsur yang ada di dalamnya baik kepala sekolah/madrasah, dewan guru, siswa, wali murid, komite sekolah dan masyarakat atau masyarakat lingkungan sekolah itu sendiri. Selain itu, perencanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dilakukan dengan cara menyusun RKAS yang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan sekolah dalam satu tahun, selanjutnya dibuat perencanaan anggaran, kemudian tim mensosialisasikannya kepada kepala sekolah, guru, wali murid dan komite sekolah, selanjutnya RKAS dipajang di papan pengumuman sekolah sehingga semua warga sekolah bisa mengetahui anggarannya.

Kaitannya dengan apa yang dijelaskan ini, yakni para penggunaan dana untuk masing masing anggaran disesuaikan dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020, kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan dana bos hanya kegiatan operasional sekolah seperti yang telah dijelaskan pada petunjuk teknis BOS, antara lain: a) penerimaan Peserta Didik baru, b) pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, kegiatan asesmen/evaluasi pembelajaran, administrasi kegiatan sekolah, pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana dan prasarana Sekolah, penyediaan alat multi media pembelajaran, dan juga pembayaran honor.

Biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Biaya pendidikan memiliki peranan yang sangat menentukan dalam setiap upaya pencapaian tujuan pendidikan baik bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Supriadi mengemukakan bahwa: “Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen instrumental (instrumental input) yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan (di sekolah) (Supardi, 2010). Manajemen perencanaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengontrolan terhadap dana yang dimiliki oleh organisasi. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, salah satunya akan sangat bergantung kepada manajemen keuangan sekolah tersebut. Pengelolaan keuangan membutuhkan sumber daya manusia yang profesional (Iskandar, J, 2019).

Dengan demikian, penggunaan dana bantuan operasional sekolah yakni membiayai komponen kegiatan-kegiatan seperti pengembangan perpustakaan, kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler peserta didik, kegiatan ulangan dan ujian, pembelian bahan-bahan habis pakai, langganan daya dan jasa, perawatan sekolah/rehab ringan sanitasi sekolah, pembayaran honorarium guru honorer dan tenaga kependidikan honorer, pengembangan profesi guru, membantu peserta didik miskin yang belum menerima bantuan program lain seperti KIP (kartu indonesia pintar), pembiayaan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah, pembelian dan perawatan perangkat computer.

2. Pelaksanaan

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos sangat penting dilakukan, dengan pengelolaan yang baik, efektif dan efisien dapat membantu masyarakat dalam mengurangi beban biaya pendidikan anaknya di sekolah itu sendiri. Selain itu, Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah hendaknya dilakukan dan dimanfaatkan penggunaannya dengan benar dan tepat sasaran sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai. Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah wajib berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai kementerian teknis yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan dan pengelolaan program dana bantuan operasional sekolah. Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah adalah pengelolaan yang baik, efektif dan efisien. Pengelolaan yang baik merupakan suatu keberhasilan sekolah dalam mengelola dana bantuan operasional sekolah melalui proses kerjasama yang sistematis mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi.

Pelaksanaan manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan dengan berpedoman pada buku petunjuk teknis penggunaan dana bantuan operational sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dikelola secara transparan artinya dalam pengelolaan dana bantuan operaional sekolah ini diketahui oleh masyarakat sekolah dan dilakukan secara akuntabel yaitu dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada warga sekolah, masyarakat dan pemerintah. selain itu juga melakukan koordinasi dan sosialisasi kepada berbagai pihak yang terlibat dalam perencanaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dan juga didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama

antara tim manajemen dana bantuan operasional sekolah dengan dewan guru dan komite sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS /RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana bantuan operasional sekolah tersebut kemudian kami tuangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 48 Ayat (1) dijelaskan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Semua kegiatan yang menghasilkan output yang berkualitas tidak terlepas dari ketersediaan biaya yang cukup. Menurut Rohiat (2010) bahwa pengembangan manajemen sekolah yang sesuai dengan SNP sesuai dengan program sekolah dapat dikembangkan di antaranya dengan: a) peningkatan kerjasama dengan masyarakat, b) implementasi prinsip kemandirian, transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan sustainability program sekolah (Rohiat, 2016). Optimalisasi fungsi-fungsi manajemen dapat diterapkan dalam setiap aspek pembiayaan untuk mendukung kegiatan. Hal ini dikarenakan biaya merupakan salah satu unsur yang sangat berpengaruh dalam suatu kegiatan di sekolah.

Bantuan operasional mengalokasikan penggunaan dana untuk pemenuhan kelengkapan fasilitas di sekolah, sekolah-sekolah penerima dana BOS di bantu untuk pembelian dan perbaikan fasilitas sarana prasarana untuk mencapai standar minimum pelayanan melalui pengembangan perpustakaan, kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler, pengadaan peralatan sekolah, dan pendayagunaan laboratorium dan bahan praktek. Sehingga, apabila sekolah memiliki kemampuan keuangan yang baik, maka kelengkapan fasilitas penunjang kegiatan belajar siswa dapat terpenuhi dengan baik. Semakin lengkap fasilitas belajar, akan semakin mempermudah dalam melakukan kegiatan belajar (Rohiat, 2016). Kegiatan belajar yang baik dapat memberikan kesan positif kepada siswa dan mutu sekolah menjadi lebih maju dan meningkat. Terlebih didukung dengan penggunaan dana bantuan operasional yang sesuai dengan prosedur dan tepat sasaran maka dapat meningkatkan kualitas sekolah.

Dalam pelaksanaannya pengelolaan dana bantuan operasional sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS Sekolah, Dewan Guru, dan Komite Sekolah yang harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RKAS/RAPBS, di samping dana yang diperoleh dari Pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir. Efek dari anggaran sekolah pada hasil siswa adalah berbagai karakteristik sekolah mempengaruhi baik anggaran sekolah serta kinerja siswa, pengeluaran anggaran tidak dapat diperlakukan sebagai variabel eksogen dalam pendidikan.

3. Pengawasan dan Evaluasi

Pengawasan merupakan fungsi manajemen dan sangat penting dilakukan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos. Sebab dengan pengawasan tersebut diharapkan manajemen keuangan sekolah dapat berjalan lancar, transparan, akuntabel dan penggunaannya yang baik dan tepat guna dan tepat sasaran. Selain itu pengawasan juga

menjadi bagian kontrol dalam pengelolaan keuangan sekolah untuk lebih berhati-hati dan memanfaatkannya sesuai dengan peruntukan dan kegunaannya berdasarkan aturan yang berlaku. Dana bantuan operasional sekolah yang telah diterima sekolah sesuai dengan jumlah siswa yang telah dikirimkan lewat dapodik selanjutnya digunakan sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah (RKAS) kemudian disusun laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Laporan dana tersebut dikirim ke Dinas Pendidikan Kabupaten dan ditempel pada papan informasi BOS di sekolah. Terhadap kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban dana BOS tersebut harus dilakukan pengawasan dan monitoring atau pemeriksaan.

Kegiatan pengawasan tersebut untuk mengetahui dan membandingkan antara perencanaan dengan pelaksanaan apakah sudah sesuai atau terjadi penyimpangan. Pengawasan dan evaluasi dilakukan oleh tim manajemen dana bantuan operasional sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat. Dalam pengawasan ini ditemukan pengelolaan dana Bantuan operasional sekolah sudah dilakukan dan digunakan sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku meskipun terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti keterlambatan dalam pencairan dana bantuan operasional sekolah dan penggunaan dana bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sekolah. Pelaksanaan pengawasan pengelolaan penggunaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan setahun sekali oleh tim dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat.

Pengawasan dan evaluasi dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional dilakukan berdasarkan pedoman dan petunjuk teknis yang ditentukan oleh kemendikbud, yaitu permendikbud Nomor 8 Tahun 2020. Pengawasan sudah dilakukan dan berjalan sesuai harapan pihak pengawas yang dilakukan setiap tiga bulan sekali atau empat kali dalam setahun. Pengawasan terdiri dari tahap menentukan standar, pengukuran hasil, melakukan perbandingan dan pembetulan terhadap penyimpangan. Dengan demikian, pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pelaksanaan pengawasan yang baik dapat dilakukan dengan selalu berpedoman kepada pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat. Pengawasan merupakan fungsi sistem yang melakukan penyesuaian terhadap rencana, mengusahakan agar penyimpangan-penyimpangan tujuan sistem hanya dalam batas-batas yang dapat ditoleransi.

Kaitannya dengan pengawasan ini dijelaskan bahwa pengawasan sangat diperlukan untuk melihat hasil yang telah dicapai. Menurut Terry dan Leslie W. Rue mengatakan bahwa pengawasan keuangan (anggaran) dilakukan untuk mengungkapkan tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan (Terry dan Leslie W Rue, 2015). Melalui ringkasan anggaran dapat dipastikan tanggung jawab untuk pelaksanaan dengan mudah. Beragam penyimpangan dengan cepat dapat dilihat dan dimintakan penjelasan-penjelasan untuk perbedaan-perbedaan yang penting. Pengawasan dan evaluasi pengelolaan keuangan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari berbagai hambatan yang dihadapi oleh kepala sekolah dalam pengelolaan dana bantuan operasional sekolah seperti tidak semua aktivitas dan pembangunan di sekolah dapat menggunakan dana bantuan operasional sekolah, terlambatnya pencairan dana dana

bantuan operasional sekolah ke rekening sekolah, dana yang keluar tidak selalu sesuai dengan jumlah siswa, terbatasnya dana apabila dibandingkan dengan kebutuhan sekolah, sebagian rekanan tidak menyiapkan dokumentasi barang yang dibeli, sebagian rekanan tidak bersedia membayar pajak atau tidak memiliki NPWP sehingga membuat bendahara kerepotan dalam menyusun laporan pertanggungjawabannya.

4. Pertanggung jawaban atau Pelaporan

Pertanggungjawaban atau pelaporan merupakan salah satu unsur penting dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat di SMP Islam al-Mujahidin Tempos. Pertanggungjawaban pengelolaan dana bantuan operasional sekolah dilakukan melalui proses pelaporan oleh Bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan secara bertahap setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola dana bantuan operasional sekolah ini yaitu buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak. Laporan pertanggungjawaban dan bantuan operasional sekolah dilakukan pada bulan terakhir masing-masing triwulan seperti triwulan pertama untuk tahun anggaran 2023 dilakukan pada akhir bulan Maret 2023 dan triwulan kedua dilakukan pada akhir Juli 2023, triwulan ketiga dibuat pada akhir September 2023 dan triwulan keempat dibuat akhir Desember 2023.

Pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah dibuat dan dilakukan pada setiap akhir masing-masing triwulan seperti untuk tahun anggaran 2023 laporannya kami buat dalam empat tahap diantaranya laporan triwulan 1 dibuat akhir Maret 2023 dan dilaporkan paling lambat 10 April 2023, triwulan II dibuat akhir Juni dan dilapor kanpaling lambat 10 Juli 2023, triwulan III dibuat pada akhir September dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Oktober 2023, triwulan IV laporannya dibuat pada akhir bulan Desember 2023 dan dilaporkan selambat-lambatnya 10 Januari 2024. Begitu pula tahun tahun sebelumnya dilakukan sesuai petunjuk teknis atau juknis dan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan agar peranggungjawaban atau pelaporan dana bantuan operasional sekolah ini tepat waktu dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Mengingat dalam pencairan laporan rekapitulasi penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang dijabarkan dalam format bantuan operasional sekolah K7a sebagai syarat untuk pencairan dana selanjutnya. Kalau pihak sekolah terlambat membuat laporan dalam bentuk format bantuan operasional sekolah K7a akan berakibat pencairan dana triwulan berikutnya akan menjadi terlambat. Bentuk laporan mengikuti format K7a dan harus sesuai dengan rencana dan kegiatan anggaran sekolah yang telah dibuat. Termasuk menyiapkan buku pembantu kas, buku Bank, buku pajak, kuitansi pembelian barang, daftar penerimaan honor atau insentif dan tranfort. Penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekoah ini agak sedikit rumit dan membutuhkan ketelitian dan kecermatan, sehingga pada triwulan pertama sering mengalami kesalahan terutama dalam pembuatan laporan dengan format BOS-K7a. Pertanggungjawaban atau pelaporan dalam manajemen keuangan dana bantuan operasional sekolah guna meningkatkan partisipasi masyarakat juga dilakukan melauai dua tahapan pokok yaitu membuat pembukuan, adanya bukti pengeluaran dan adanya pelaporan.

Kaitannya dengan Pembukuan ini dijelaskan bahwa pembukuan keuangan sendiri adalah proses pencatatan semua transaksi keuangan selama proses berlangsungnya sebuah usaha yang bertujuan untuk menyimpan catatan dari semua transaksi keuangan secara tepat

dan sistematis (Mulyani, A. S., Nurhayaty, E., & Miharja, K, 2019). Pembukuan keuangan memiliki banyak manfaat, antara lain sebagai acuan untuk mengetahui keuntungan dan kerugian dan sebagai alat penilaian dan arsip dokumen mengenai semua jenis pembayaran. Selain itu, pembukuan juga sebagai alat pengontrol arus kas yang masuk dan keluar serta pengalokasian modal serta dana untuk keberlangsungan sebuah usaha (Wardi, J., Putri, G. eka, & Liviawati, 2020). Sehingga dengan adanya pembukuan ini dapat meminimalisir risiko kehilangan produk, asset, uang, bahkan kecurangan lainnya. Pembukuan ini juga sebagai bahan evaluasi layak atau tidaknya usaha tersebut dipertahankan karena usaha yang baik dan berlanjut yakni usaha yang konsisten dalam pencatatan transaksi keuangannya.

SIMPULAN

Manajemen Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di SMP Islam Al-Mujahidin Tempos dilakukan dengan cara: a) melakukan perencanaan seperti menyusun RAPBS dan RKAS yang melibatkan kepala sekolah, bendahara sekolah, dewan guru, pegawai, wali murid dan komite sekolah serta melibatkan masyarakat, b) Pelaksanaan dalam manajemen keuangan dengan berpedoman pada Buku Petunjuk Teknis Penggunaan dana bantuan operasional sekolah yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, dikelola secara transparan, akuntabel dan berkeadilan, c) Pengawasan dan evaluasi, dilakukan secara bersama-sama oleh kepala sekolah, guru, komite sekolah, tim pengelolaan dana bantuan operasional sekolah termasuk tim Dinas Pendidikan dan Kabupaten Lombok Barat, serta Inspektorat, d) pertanggung jawaban atau pelaporan, dilakukan dengan membuat pembukuan, bukti pengeluaran dan pelaporan melalui proses pelaporan oleh bendahara sekolah. Pembuatan pelaporan dikerjakan secara bertahap setiap hari dibantu guru. Beberapa buku yang harus dibuat dalam tata kelola dana bantuan operasional sekolah ini yaitu buku kas umum, buku pembantu kas umum, buku pembantu bank, buku pembantu pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arwildayanto, et.al. (2017). *Manajemen Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan*. IKAPI.
- Departemen Pendidikan Nasional. (2012). *Manajemen Keuangan: Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah*. Dirjen Dikdasmen.
- Depdiknas. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Direktorat Jendral pendidikan dan Kebudayaan.
- Hiryanto. (2018). *Partisipasi Masyarakat Melalui Pendidikan Nonformal*. FIP: UNY.
- Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan. *IDARAH*, 3 (1).
- Jerome S. Arcaro. (2007). *Pendidikan Berbasis Mutu, Prinsip-Prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapannya*. Pustaka Pelajar.
- John W. Creswell. (2016). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moleong. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda Karya.
- M. Hasbullah. (2015). *Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi dan Kondisi*

Objektif Pendidikan di Indonesia. Rajawali Pers.

- Mulyani, A. S., Nurhayaty, E., & Miharja, K. (2019). Penerapan Pencatatan dan Laporan Akuntansi Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM). *Jurnal Abdimas BSI*, 2(2).
- Rahmadhani & Suparno. (2020). *Pengaruh Sistem Pengendalian dan Peran Komite Sekolah Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SMP Negeri di Banda Aceh*. 5(3).
- Rohiat. (2016). Peran Kepala Sekolah Dalam Pengembangan Manajemen Sekolah Sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sd Plus Islam Excellent Bukittinggi. *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 1(2).
- S. Thomas Foster. (2017). *Managing Quality Integrating the Supply Chain*. Pearson Education International.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Soetopo & Wasty Soemanto. (2002). *Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan*. Usaha Nasional.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Supardi. (2010). Pengembangan Pendidikan Karakter di Sekolah. *Seminar Nasional Zoio: "Character Building for Vocational Education."*
- Syunu Trihantoyo. (2017). *Manajemen Keuangan Pendidikan*. Pustaka Setia.
- Terry dan Leslie W Rue. (2015). *Dasar Dasar Manajemen*. Bumi Aksara.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 1 ayat (39)*. (n.d.).
- Wardi, J., Putri, G. eka, & Liviawati, L. (2020). Pentingnya Penerapan Pengelolaan Keuangan Bagi UMKM. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1).